

## ABSTRAK

- (A) Nama : Winda Gadis Sukardi (NIM: 205160025)
- (B) Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Pada Label Gas LPG Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- (C) Halaman : viii + 85 + 9 + 2020.
- (D) Kata Kunci : Gas Elpiji, Informasi Pada Label Gas Elpiji, Perlindungan Konsumen
- (E) Isi :
- Perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi pada label gas elpiji, khususnya label gas eliji yang dijual kembali oleh CV. Berkat Ageng Suminar. Seringkali diabaikan. Pada prakteknya CV. Berkat Ageng Suminar menjual gas elpiji yang berat bersihnya tidak sesuai dengan ukuran yang tercantum di dalam label, bahkan sering di oplos sehingga sangat merugikan konsumen pengguna gas elpiji sejak dikeluarkannya kebijakan konversi minyak tanah ke gas elpiji yang diprogramkan oleh Pemerintah. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas informasi pada label gas elpiji yang tidak sesuai, Apakah putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN.Byl terkait hak konsumen atas informasi bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara preskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil analisis maka perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna gas elpiji yang dirugikan tersebut didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat meminta kompensasi, ganti rugi atau penggantian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf h, selain itu hak untuk mendapatkan advokasi baik melalui pengadilan maupun BPSK sebagai upaya penyelesaian sengketa secara patut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf e UUPK. Analisis selanjutnya terhadap isi putusan pengadilan negeri Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN. Byl ternyata bertentangan dengan Pasal 8 huruf a, b, dan c UUPK sehingga atas perbuatannya pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana dan hukuman tambahan berupa persampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha. Sebagai saran hendaknya diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan gas elpiji agar kasus seperti ini tidak terulang kembali.
- (F) Acuan : 38 (1994 – 2019)
- (G) Pembimbing : Dr. Sri Bakti Yunari, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Winda Gadis Sukardi.